

## Analisis Kebijakan Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP-K) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Lidiana Fitria Ningsih, Rahmania Ramadhani Dzikrullooh, Fitrotul Mutiara Sukma, Sulistya Umie  
Ruhmana Sari

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144

E-mail: [lidiana05fitri@gmail.com](mailto:lidiana05fitri@gmail.com)

**Abstract:** KIP-K is a scholarship program launched by the Indonesian government to support underprivileged students in accessing higher education. This research applies a qualitative approach with a case study design to examine the implementation of the KIP-K policy at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Data were obtained through interviews and documentation, then analyzed using four stages: data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The study shows that the KIP-K policy at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang is already equipped with established procedures, criteria, and requirements that must be met by prospective recipients. The student affairs staff responsible for KIP-K management carries out rigorous assessments, including surveys and direct verification, to ensure the accuracy of data and the eligibility of applicants so that the program benefits those who truly need it. Nevertheless, the implementation still faces several challenges, such as document forgery by students attempting to qualify, secret marriages that affect recipient eligibility, and students transferring study programs without informing the KIP-K management staff. Another issue encountered is the late submission of academic grades, which often hampers the timely disbursement of KIP-K funds. These problems not only create administrative difficulties but also potentially undermine the effectiveness and credibility of the scholarship program. Therefore, this research suggests the need for more intensive socialization efforts targeted at both students and lecturers. By improving awareness of the regulations, responsibilities, and possible consequences of violations, the university can build a more transparent and accountable management system. Such measures are expected to minimize irregularities and ensure that KIP-K continues to achieve its primary goal, namely to provide equal opportunities for underprivileged students to pursue higher education and to contribute to the development of human resources in Indonesia.

**Keywords:** Education, Policy, KIP-K

**Abstrak:** Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) merupakan program beasiswa yang diluncurkan pemerintah Indonesia untuk membantu mahasiswa kurang mampu dalam memperoleh akses pendidikan tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengkaji implementasi kebijakan KIP-K di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan KIP-K di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah dilengkapi dengan prosedur, kriteria, serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima. Pihak kemahasiswaan selaku pengelola KIP-K menerapkan seleksi yang ketat melalui survei maupun verifikasi langsung untuk memastikan keabsahan data dan kelayakan mahasiswa sehingga bantuan dapat diberikan tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Meskipun demikian, implementasi program ini masih menghadapi beberapa kendala. Beberapa mahasiswa diketahui melakukan pemalsuan dokumen untuk dapat lolos seleksi, adanya pernikahan siri yang memengaruhi kelayakan

penerima, serta kasus perpindahan program studi tanpa sepengetahuan pengelola KIP-K yang menimbulkan persoalan administratif. Selain itu, keterlambatan penginputan nilai akademik juga kerap menghambat proses pencairan dana KIP-K. Permasalahan tersebut tidak hanya menimbulkan kesulitan administratif, tetapi juga berpotensi melemahkan efektivitas serta kredibilitas program beasiswa. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada mahasiswa maupun dosen mengenai aturan, kewajiban, dan konsekuensi dari penyalahgunaan program. Dengan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran, diharapkan terbangun sistem pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel. Upaya ini penting untuk meminimalisasi penyimpangan sekaligus memastikan KIP-K tetap berjalan sesuai tujuan utamanya, yaitu memberikan kesempatan yang adil bagi mahasiswa kurang mampu untuk menempuh pendidikan tinggi serta berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.

**Kata kunci:** Pendidikan, Kebijakan, KIP-K

Pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia karena membantu individu mengembangkan dan membentuk kepribadian melalui proses transfer pengetahuan dalam pendidikan formal, nonformal, dan informal (Larasati et al., 2022). Pendidikan yang bermutu akan melahirkan generasi bangsa yang kompeten dan berkualitas. Di Indonesia, pentingnya pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berusia tujuh hingga lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungannya (*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, 2003*).

Melalui undang-undang tersebut, pemerintah menegaskan hak pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan, serta menciptakan masyarakat yang lebih adil. Undang-undang juga menekankan perlunya keterlibatan semua pihak—orang tua, masyarakat, dan pemerintah—dalam mendukung proses pendidikan. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi, pada tahun 2020 pemerintah melalui Program Indonesia Pintar (PIP) meluncurkan bantuan finansial bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Program ini bertujuan meningkatkan akses pendidikan tinggi secara merata dan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu (Amin1 et al., 2022). KIP Kuliah Merdeka merupakan komitmen Kemendikbud dalam menyediakan pendidikan tinggi bermutu dan berkelanjutan guna mempercepat pembangunan SDM. Program ini menanggung biaya pendidikan dan hidup sekitar 200 ribu mahasiswa baru di PTN maupun PTS, dengan besaran bantuan sesuai kebutuhan tiap program studi. Dampaknya diharapkan tidak hanya dirasakan penerima, tetapi juga masyarakat melalui peningkatan kompetensi, produktivitas, dan inovasi nasional. Lebih dari sekadar bantuan finansial, KIP Kuliah berperan membangun ekosistem pendidikan inklusif dan berkeadilan, sekaligus mendorong perguruan tinggi meningkatkan kualitas layanan. Keberhasilan program ini memerlukan pemantauan berkelanjutan serta dukungan aktif dari lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Surah An-Nisa' ayat 59 menekankan pentingnya ketaatan dalam Islam, dimulai dengan perintah kepada orang-orang beriman untuk menaati Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini juga menegaskan bahwa umat Islam harus menaati Ulil Amri, yaitu pemimpin yang memiliki otoritas dalam masyarakat, selama mereka memerintahkan kebaikan dan tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Ketika terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, umat Islam dianjurkan untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam untuk mencari penyelesaian. Hal ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemimpin penting dilakukan, namun tetap harus selaras dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini menekankan bahwa ketaatan kepada pemimpin yang adil akan membawa kebaikan dan keberkahan, menciptakan harmoni dalam masyarakat, dan memberikan hasil yang terbaik bagi semua pihak.

Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) bertujuan meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa kurang mampu, namun dalam praktiknya masih menuai kontroversi. Sejumlah laporan menunjukkan adanya penyaluran yang tidak tepat sasaran, di mana mahasiswa mampu justru menerima bantuan sementara yang benar-benar membutuhkan terabaikan. Kondisi ini menunjukkan kelemahan sistem seleksi dan verifikasi yang belum mampu membedakan secara efektif calon penerima beasiswa. Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan dana juga masih lemah sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan. Akibatnya, tujuan utama program untuk mendukung pendidikan mahasiswa kurang mampu tidak sepenuhnya tercapai. Untuk itu, mekanisme seleksi dan distribusi KIP-K perlu diperketat dengan verifikasi lebih menyeluruh dan transparan, melibatkan sekolah, masyarakat, dan instansi terkait. Pengawasan serta evaluasi penggunaan dana juga harus diperkuat agar beasiswa benar-benar digunakan sesuai tujuan awalnya. Dengan langkah tersebut, KIP-K diharapkan dapat memberikan manfaat optimal dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi di Indonesia.

Penelitian ini berangkat dari urgensi memastikan implementasi KIP-K tepat sasaran, karena program ini tidak hanya memengaruhi keberlangsungan studi mahasiswa, tetapi juga kualitas lulusan yang berkontribusi pada pembangunan bangsa. Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, KIP-K menjadi program strategis bagi mahasiswa berprestasi dari kalangan ekonomi lemah, namun pelaksanaannya masih terkendala pemalsuan dokumen, pernikahan siri, perpindahan prodi tanpa izin, serta keterlambatan input nilai yang menghambat pencairan dana. Data terdahulu juga menunjukkan distribusi KIP di Kabupaten Bengkayang belum merata, banyak siswa putus sekolah, bantuan tidak tepat sasaran, serta adanya penyalahgunaan dana oleh wali murid. Kondisi ini menegaskan perlunya pengawasan, evaluasi, dan sosialisasi lebih mendalam agar tujuan pemerataan akses pendidikan benar-benar tercapai. (Dimmera & Purnasari, 2020).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus untuk menganalisis kebijakan program beasiswa KIP-K. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap kebijakan program beasiswa KIP-K di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami kebijakan tersebut dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi, serta dampaknya terhadap para penerima beasiswa.

Penelitian kualitatif adalah penelitian pada kondisi alami dengan peneliti sebagai instrumen utama, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis untuk menemukan makna mendalam, bukan angka atau generalisasi. (Sugiyono, 2009) Sedangkan Studi kasus merupakan suatu bentuk analisis yang dilakukan secara mendalam, terfokus, dan rinci terhadap individu, kelompok, lembaga, atau suatu fenomena yang muncul di masyarakat. (Maimun, 2020) Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali data yang mendalam, khususnya terkait pengalaman, pandangan, dan persepsi penerima beasiswa, pengelola, serta pemangku kepentingan program KIP-K.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

#### Prosedur Dan Kriteria Penerimaan Beasiswa KIP-K

Proses pendaftaran KIP-K dengan jalur yang sama, dinyatakan langsung oleh staff pengurus KIP, bahwa

*“Ada beberapa jalur masuk di uin malang diantaranya SNBP, SPAN PTKIN, SNBT, UMPTKIN, dan Mandiri. Dari setiap jalur masuk tersebut uin malang juga menyediakan pendaftaran KIP kuliah, yang batas pendaftarannya persis dengan jadwal jalur tersebut. Jika calon mahasiswa mendaftar di jalur SNBP dan tidak mendaftar KIP di link yang berbeda otomatis nama mahasiswa tersebut tidak terdaftar atau tidak terdeteksi di pendaftaran KIP.”*

Pada jalur pertama yaitu SNBP, SPANPTKIN, UTBK dan SNBT tidak terlalu rumit dalam penyeleksian calon penerima KIP-K, karena pada jalur tersebut yang melakukan penyeleksian adalah tim penyeleksi nasional atau dari pusat itu sendiri, yaitu dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3). (Kemdikbud, 2024) Kuota yang tersedia dari jalur tersebut juga tidak dibatasi sehingga para penerima yang lolos pada tahap administrasi langsung melanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu tahap verifikasi atau survey langsung ke rumah penerima KIP-K. Pada tahap survey inilah yang berbeda dari kampus yang lain. Staff pengurus KIP menyatakan,

*“Untuk proses penyeleksian KIP pada jalur SNBP/SPAN ptkin ini tidak ada problem karena tim penyeleksi dari nasional dan kuota KIPK masih banyak jadi yang lolos pada tahap satu yaitu administrasi maka langsung di verifikasi atau di survey langsung. pada tahap verifikasi ini yang membedakan proses standarisasi yang berada di uin malang dengan kampus kampus yang lain.”*

Dalam sebuah prosedur pasti memiliki syarat yang harus dipenuhi dalam penerimaan KIP-K di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang baik dari calon penerima itu sendiri dan dokumen yang dicantumkan, diantaranya sebagai berikut: (Rektor, 2022) Persyaratan Calon Penerima: 1) Mahasiswa baru lulusan MA/MAK/SMTK/SMAK/SMA atau sederajat pada tahun berjalan dan maksimal 2 tahun sebelumnya; 2)

Memiliki keterbatasan ekonomi tetapi memiliki potensi akademik yang baik yang didukung bukti dokumen yang sah; 3) Pembuktian pemenuhan persyaratan; 4) Keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan kepemilikan program bantuan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau Kartu Jakarta Pintar (KJP), atau berasal dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH); 5) Jika calon penerima tidak memenuhi salah satu dari kriteria pada point 1, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP Kuliah asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 6) Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas. Sedangkan persyaratan dokumen: 1) Kartu peserta ujian masuk pada salah satu jalur seleksi; 2) formulir pernyataan Pakta Integritas yang telah diisi dan dibubuhi materai; 3) Surat keterangan lulus dari Kepala Sekolah (jika sudah ada); 4) Rapor semester 1 (satu) s.d. 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah; 5) Ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah (jika sudah keluar); 6) Nilai ujian akhir nasional yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah (jika sudah keluar); 7) Surat keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lain di bidang ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang disahkan (legalisasi) oleh Kepala Sekolah (jika ada); 8) Surat Keterangan Penghasilan Orang tua/wali dan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan oleh Kepala desa/Kepala dusun/Instansi tempat orang tua bekerja/tokoh masyarakat, apabila pendaftar belum mempunyai salah satu kartu (Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau Kartu Jakarta Pintar (K.JP), atau berasal dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH); 9) Surat keterangan kematian dari rumah sakit atau pemerintah setempat; 10) Surat keterangan PHK dari perusahaan atau tempat kerja; 11) Kartu Keluarga atau Surat Keterangan tentang susunan keluarga; 12) Foto rumah (teras rumah, ruang tamu, kamar mandi dan dapur) dan Foto pendaftar bersama orangtua/wali, ukuran 5R (berwarna) masing-masing 1 lembar; 13) Tidak hanya sebuah prosedur dan persyaratan yang menjadi poin utama pada proses penyeleksian calon penerima beasiswa KIP-K, tetapi pihak kampus yang sudah dinaungi kemenag memiliki beberapa kriteria yang juga menjadi hal penting dalam pemilihan calon mahasiswa penerima beasiswa KIP-K. Kriteria merupakan sekumpulan acuan atau prinsip yang menjadi penilaian terhadap sesuatu (Sufa, 2012). Jika hal ini tidak sesuai dengan penilaian yang sudah ditentukan, maka para calon penerima beasiswa tidak bisa lolos menjadi penerima beasiswa KIP-K. Kriteria tersebut antara lain: 1) mempunyai potensi akademik yang cukup baik; 2) berasal dari keluarga yang kurang mampu; 3) memiliki kartu KIP dan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) (Kemdikbud, 2024).

Pada umumnya kriteria yang ada pada kemenag dan kemendikbud sama. Tetapi ada sedikit perbedaan yang membedakan antara keduanya, yaitu pada kartu yang dimiliki para calon penerima beasiswa KIP-K. Syarat di kemenag bisa memakai kartu KIP, KKS, SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), Surat Penghasilan Orang tua yang mana dalam 1 anggota keluarga tidak boleh lebih dari 750.000.

Sedangkan syarat di kemendikbud wajib menggunakan KIP dan KKS. Pernyataan kriteria calon penerima KIP tersebut dinyatakan langsung oleh staff pengurus KIP,

*“Syarat utama untuk penyeleksian KIP kuliah yaitu harus mempunyai kartu, jika di kemenag aturan kartunya bisa KIP, KKS, SKTM, surat penghasilan orang tua (minimal setiap orang tidak lebih dari 750 ribu).”*

Jika kedua komponen diatas yaitu prosedur dan kriteria sudah sesuai dengan persyaratan yang diinginkan hingga pada tahap verifikasi atau survey, maka para calon mahasiswa penerima beasiswa KIP-K dinyatakan lolos sebagai mahasiswa penerima beasiswa KIP-K.

### **Mekanisme Penerapan Kebijakan Program Beasiswa KIP-K**

Mahasiswa yang lolos jalur KIP Kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mendapat fasilitas UKT gratis dan uang saku bulanan melalui ATM kampus. Namun, pencairan dana memerlukan proses verifikasi, salah satunya penginputan nilai IP dan IPK melalui formulir online untuk menentukan kelanjutan beasiswa. Mahasiswa berhak menerima KIP lanjutan jika memiliki IP di atas 3,20, sedangkan yang tidak memenuhi syarat atau memiliki kendala tertentu dapat diputus dari program.

Mahasiswa penerima KIP Kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat diputus beasiswanya apabila tidak memenuhi beberapa ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah persyaratan prestasi akademik, di mana mahasiswa wajib memiliki IP minimal 3,20 setiap semester. Jika nilai IP kurang dari ketentuan tersebut, mahasiswa akan mendapat peringatan hingga dua kali, dan jika tidak ada perbaikan maka beasiswa akan dihentikan serta digantikan oleh mahasiswa lain yang lebih berhak. Selain itu, meskipun menikah tidak dilarang, status tersebut dapat memengaruhi kelayakan penerima, karena dianggap sudah memiliki dukungan finansial dari pasangan. Larangan lain bagi penerima adalah berpindah program studi atau perguruan tinggi, sebab tindakan tersebut membuat mahasiswa kehilangan hak untuk mengajukan KIP kembali. Begitu pula dengan cuti akademik, yang pada prinsipnya tidak diperbolehkan karena dana KIP hanya diperuntukkan bagi kebutuhan pendidikan. Namun, jika cuti dilakukan karena alasan khusus seperti sakit, beasiswa tetap berlanjut tanpa penambahan masa bantuan.

### **Faktor faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan beasiswa KIP Kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**

Evaluasi terhadap ketercapaian tujuan Program KIP Kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menunjukkan bahwa beasiswa ini benar-benar membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu dalam melanjutkan pendidikan tinggi. Hal ini terlihat dari berbagai testimoni mahasiswa penerima yang menyatakan bahwa program tersebut meringankan beban biaya kuliah, biaya hidup, serta memberi motivasi untuk berprestasi. Salah satu mahasiswa penerima KIP menyatakan

*“Sangat berpengaruh, saya sudah mendapat bantuan KIP/PIP sejak dibangku SD-SMA. Setelah saya masuk Kuliah KIP/PIP ini sangat bermanfaat karena uang kuliah dan biaya hidup di rantau tergolong tidak murah, dengan bantuan PIP/KIP ini bisa membantu saya dalam pembiayaan UKT & biaya hidup. Dengan mendapatkan beasiswa KIP-K ini berpengaruh pada studi & kehidupan saya karena saya yg dilihat dari keluarga sederhana ini mampuloh untuk melanjutkan cita-cita*

*saya dengan berkuliah secara gratis ditanggung pemerintah. Bahkan saat sebelum ayah saya meninggal dunia saya memberikan kabar gembira ini bahwa saya bisa kuliah menggunakan beasiswa dan saat itu beliau menangis, oleh karena itu saya tidak akan menyia-nyiakkan kesempatan emas yang diberikan ini, dan Alhamdulillah nilai akademik saya selalu baik.”*

Selain itu mahasiswi lain mengatakan,

*“Setelah menerima beasiswa KIP, beban finansial keluarga saya akan berkurang signifikan, sehingga saya bisa fokus sepenuhnya pada studi saya. Dukungan ini akan memotivasi saya untuk belajar lebih giat dan mencapai hasil yang lebih baik. Tanpa khawatir mencari sumber dana tambahan, saya dapat mengembangkan keterampilan yang berguna untuk karier masa depan. Dalam jangka panjang, beasiswa ini akan membantu saya menyelesaikan pendidikan tinggi dan membuka lebih banyak peluang karier, memungkinkan saya meraih cita-cita tanpa terbebani masalah keuangan.”*

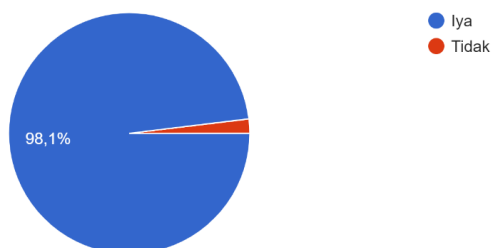
Mahasiswa penerima KIP-K lain juga menuturkan,

*“Alhamdulillah dengan wasilah KIP saya bisa melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi dan menambah harapan saya untuk bisa merubah masa depan juga bisa memperbaiki keadaan ekonomi keluarga saya”*

Dari beberapa respon mahasiswa penerima KIP yang lain menyatakan bahwa bantuan pemerintah ini sangat membantu mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk bisa melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, beasiswa ini sangat berpengaruh untuk kehidupan dan studi diantaranya dapat membantu meringankan beban keluarga, dengan dana KIP bisa digunakan untuk membayar kost, uang makan, dan kebutuhan tugas tugas kuliah, serta dengan mendapatkan bantuan dana KIP kuliah ini bisa dijadikan motivasi oleh mahasiswa untuk terus berprestasi, bersungguh sungguh dan semangat untuk kuliah supaya IP semester memenuhi target dan berharap bisa merubah masa depan anak bangsa karena mereka kuliah dengan uang pemerintah oleh karena itu banyak mahasiswa yang merasa diamanahi sehingga mereka harus memberikan timbal balik yang sesuai.

Beasiswa KIP kuliah ini benar benar dapat membantu biaya Pendidikan mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim malang yang dapat dinyatakan dalam diagram di bawah ini.

Apakah Anda merasa beasiswa KIP benar-benar membantu meringankan beban biaya pendidikan Anda?  
52 jawaban



**Gambar 1. Hasil Presentase Responden**

Dari diagram diatas dapat dinyatakan bahwa sebanyak 98,1% responden menjawab beasiswa KIP kuliah dapat membantu meringankan beban biaya Pendidikan mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan sisanya 1,9% responden kuisoner menjawab tidak meringankan beban biaya. Mahasiswa non-penerima KIP juga memberikan persepsi positif. Mereka menilai bahwa teman-teman penerima beasiswa cenderung lebih giat, aktif di kelas, serta memanfaatkan kesempatan kuliah dengan sungguh-sungguh. Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang non-penerima KIP kuliah merespon menyatakan,

*“Iya saya mempunyai teman yang menerima KIP Kuliah, mereka lebih giat dalam menempuh perjalanan akademik mereka”.*

Selain itu, mahasiswa non penerima KIP juga merespon,

*“Ya ada kebanyakan dari mereka aktif dikelas walau tidak yg terlihat sekali tali dia sungguh memanfaatkan kesempatannya dalam berkuliah dengan baik, serta orangnya humble”*

Dari respon mahasiswa non-penerima KIP-kuliah dapat dinyatakan bahwa program KIP kuliah ini memang benar benar memberikan dampak positif bagi kehidupan dan studi mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Bagi mahasiswa yang menerima manfaat dari program ini, hal ini telah memungkinkan mereka untuk melanjutkan studi dan mencapai kemampuan akademis maksimal. Sementara bagi mahasiswa yang tidak menerima manfaat langsung, program ini telah memberikan dampak positif pada lingkungan akademik mereka. Meskipun pandangan terhadap program ini dapat bervariasi, tidak dapat dipungkiri bahwa program ini telah memberikan kontribusi besar bagi pendidikan tinggi di Indonesia (Yusra et al., 2024).

Dari sisi ketepatan sasaran, sebagian besar mahasiswa menilai bahwa KIP di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah disalurkan dengan baik karena proses seleksi yang ketat, termasuk adanya survei langsung ke rumah mahasiswa. Namun, muncul pula persepsi dari beberapa mahasiswa non-penerima bahwa penerima KIP kadang terlihat menggunakan fasilitas mewah, seperti ponsel iPhone atau kendaraan pribadi, sehingga menimbulkan anggapan bahwa program tidak sepenuhnya tepat sasaran. Salah satu mahasiswa menyatakan,

*“Fasilitas yang digunakan penerima Beasiswa KIP sehari hari? I do not know apa yang perlu diperbaiki. Tapi kebanyakan dari mereka pake iPhone, style nya kayak orang berada.”*

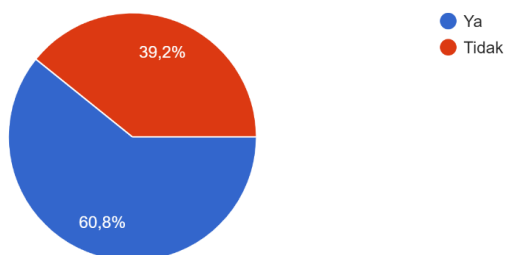
Namun selaku pengelola beasiswa KIP di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menanggapi hal tersebut dan mengatakan

*“barang dan aset yang bagus itu tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk ekonomi seseorang, bisa saja itu adalah pemberian atau dapat hadiah”.*

Dari perkataan beliau dapat dinyatakan bahwa kita tidak boleh suudzon atau berprasangka buruk kepada seseorang, karena orang yang membeli Iphone mungkin mereka membutuhkannya.

Selain itu banyak mahasiswa non-penerima KIP kuliah melihat bahwa mahasiswa penerima KIP kuliah menggunakan fasilitas yang lebih dari mahasiswa

Apakah anda melihat teman anda yang menerima beasiswa KIP namun memiliki fasilitas yang lebih (seperti mobil, atau barang mewah lainnya)  
51 jawaban



**Gambar 1. Hasil Presentase Responden**

Data kuisisioner mendukung adanya persepsi ini, di mana 60,8% mahasiswa non-penerima menganggap penerima KIP memiliki fasilitas lebih dibanding teman lainnya, sedangkan 39,2% tidak melihat hal demikian. Meski begitu, tim seleksi tetap berupaya menjaga standar agar beasiswa tepat sasaran, dengan menilai kondisi ekonomi secara menyeluruh, sehingga tidak serta-merta menjadikan kepemilikan barang mewah sebagai indikator kesejahteraan mahasiswa.

### **Hambatan Dan Tantangan Pelaksanaan Program Beasiswa KIP-K**

Lemahnya validasi dalam pelaksanaan program KIP-K di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi salah satu hambatan utama, terutama dalam proses rekrutmen. Pendaftaran beasiswa KIP-K pada jalur mandiri menghadapi tantangan besar karena tim penyeleksi berasal dari internal kampus. Jumlah pendaftar yang lebih banyak dibandingkan jalur lain membuat seleksi harus dilakukan secara ketat agar tetap adil dan transparan. Sebelumnya, keputusan untuk tidak membuka jalur mandiri sempat menimbulkan kontroversi karena dikhawatirkan rawan pemalsuan data, dan ketika jalur ini akhirnya dibuka kembali, kasus pemalsuan data memang terjadi meski dalam jumlah terbatas. Hal ini menegaskan pentingnya adanya pengawasan dan verifikasi yang ketat agar bantuan benar-benar sampai pada mahasiswa yang layak. Berdasarkan hasil wawancara tim standarisasi KIP-K UIN Malang menjelaskan:

*“Ada dua masalah utama pada jalur mandiri. Pertama, adanya kasus pemalsuan data di mana informasi yang diajukan tidak akurat. Meskipun kejadian ini terbatas, ada beberapa calon pendaftar yang melakukan hal itu.*

Maka dari itu diperlukan adanya validasi data, proses validasi data yang ketat merupakan tantangan signifikan dalam pelaksanaan KIP-K. Validasi data adalah langkah penting untuk memastikan bahwa beasiswa diberikan kepada yang benar-benar memenuhi syarat. Menurut teori Kebijakan Publik (Publik, 2013) validasi yang ketat diperlukan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pemberian bantuan. Validasi data melibatkan verifikasi berbagai dokumen dan informasi yang diajukan oleh calon penerima beasiswa, seperti surat keterangan tidak mampu, bukti pendapatan orang tua, dan data akademik.

Proses ini penting untuk memastikan bahwa beasiswa benar-benar diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat dan membutuhkan.

Selain validasi pada tahap rekrutmen, validasi juga dilakukan setelah mahasiswa resmi menjadi penerima KIP-K. Tim kemahasiswaan tidak hanya memeriksa dokumen, tetapi juga melakukan survey lapangan ke rumah mahasiswa untuk memastikan kondisi ekonomi sesuai dengan data yang diajukan. Akan tetapi, keterbatasan dana menjadi hambatan besar, terutama untuk survey ke luar Jawa. Akibatnya, validasi untuk mahasiswa di luar Jawa hanya bisa dilakukan secara online melalui video call dengan orang tua. Meskipun terbatas, langkah ini dianggap penting untuk memastikan kebenaran data. Dalam praktiknya, survey lapangan menghadapi tantangan lain, seperti akses ke daerah terpencil dan kurangnya keterbukaan dari pihak keluarga yang merasa enggan memberikan informasi. Namun demikian, validasi tetap dipandang krusial untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas program, mengingat dana beasiswa KIP-K berasal dari anggaran negara. Dalam wawancara staff pengurus KIP,

*“Kedua, banyak mahasiswa yang lolos seleksi masuk namun tidak mendaftar KIP. Hal ini membuat tim kemahasiswaan terbatas dalam tindakan lebih lanjut. Disebabkan oleh keterbatasan anggaran, tidak semua rumah bisa di survey. Tapi untuk rumah yang di luar Jawa, proses verifikasi dilakukan melalui video call”.*

Adapun dalam proses survey lapangan ada beberapa tantangan yaitu akses ke daerah yang terpencil terutama rumah mahasiswa yang di daerah pedalaman, keterbukaan pihak keluarga yang merasa tidak nyaman atau enggan memberikan informasi terkait kondisi ekonomi mereka. Survey ini tidak hanya untuk menjaga integritas program, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program beasiswa ini yang bertujuan untuk meningkatkan akses Pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain masalah validasi, kelemahan lain yang muncul adalah lemahnya monitoring dan pengawasan secara berkala. Salah satu hambatan besar adalah keterlambatan penginputan nilai mahasiswa, yang menjadi indikator utama penentuan kelayakan beasiswa. Keterlambatan ini sering disebabkan oleh dosen yang terlambat mengisi nilai, adanya mahasiswa yang masih menempuh remedial, maupun kendala teknis pada sistem informasi akademik. Seperti yang diungkapkan staff pengurus KIP,

*“Harus tunggu nilai dari mahasiswa, namun biasanya tidak semua dosen itu mengisi nilai tersebut, karena biasanya ada yang terlambat, ada yang kemudian remidi, jika kita langsung cut off maka tidak boleh ada yang berubah, namun ternyata di akhir-akhir itu ada yang berubah misal ada nilai yang belum masuk, maka harus menunggu lagi dan menunggu lagi”.*

Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya perbaikan sistem penginputan nilai dan peningkatan koordinasi antara dosen dengan bagian administrasi akademik, bahkan dengan menambah tenaga khusus untuk menangani data..

Tidak hanya itu, terdapat pula kasus mahasiswa penerima KIP-K yang melanggar ketentuan program, misalnya menikah tanpa melapor kepada pihak kampus. Padahal, ketentuan KIP-K secara tegas melarang penerima menikah selama masa studi agar fokus akademik tetap terjaga. Sayangnya, pelanggaran ini sulit terdeteksi karena kurangnya pengawasan dan kejujuran mahasiswa.

Sebagaimana pernyataan staff pengurus KIP,

*"Ya itu yang gak jujur tadi, apalagi udah jadi mahasiswa kadang gak jujur, misalnya udah nikah gak ngomong, mestinya kan diputus, kita tahu dari temennya "pak itu udah nikah pak", temennya sinis mungkin ya, jadi dia lapor kesini, dan kita yang suruh tanya, ya dihubungi dulu konfirmasi, memastikan, bener atau tidak "saya nikah sirih pak", tetep gak bisa, mau nikah sirih meskipun nikah apa, tetep gak bisa, atau juga yang pindah prodi, kita kan by NIM ya, itu kita pasti tahu, ya itu udah konsekuensinya sih"*

Lebih lanjut, untuk mencegah pelanggaran serupa, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai ketentuan KIP-K kepada mahasiswa. Mahasiswa perlu memahami konsekuensi dari pelanggaran ketentuan, tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi mahasiswa lain yang berpotensi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa akibat alokasi yang tidak tepat.

## **PEMBAHASAN**

### **Prosedur Dan Kriteria Penerimaan Beasiswa KIP-K**

Berdasarkan hasil penelitian, penerimaan KIP-K di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki prosedur khusus yang disesuaikan dengan jalur masuk mahasiswa, seperti SNBP, SPAN-PTKIN, SNBT, UMPTKIN, dan Mandiri. Calon mahasiswa wajib mendaftar KIP-K pada jalur yang sama dengan jalur masuk yang dipilih, sebab prosedur ini tidak dapat ditukar ataupun diubah. Hal ini ditegaskan oleh pihak kampus bahwa jika mahasiswa hanya mendaftar jalur seleksi tanpa mendaftarkan KIP-K pada link resmi, maka secara otomatis namanya tidak akan terdeteksi dalam sistem KIP-K. Pada jalur SNBP, SPAN-PTKIN, UTBK, maupun SNBT, proses seleksi relatif lebih sederhana karena dilakukan langsung oleh tim nasional dari Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3), dengan kuota yang tidak dibatasi. Mahasiswa yang lolos administrasi langsung melanjutkan ke tahap verifikasi berupa survei lapangan ke rumah calon penerima, yang menjadi salah satu keunikan proses seleksi di UIN Malang dibanding kampus lain.

Selain prosedur, persyaratan penerimaan juga meliputi kriteria khusus yang harus dipenuhi calon mahasiswa, baik dari sisi akademik maupun kondisi ekonomi. Mahasiswa baru lulusan maksimal dua tahun sebelumnya dengan potensi akademik baik serta keterbatasan ekonomi dapat mendaftar, dibuktikan melalui kepemilikan kartu bantuan nasional seperti KIP, KKS, atau KJP, maupun dokumen resmi lain seperti surat keterangan penghasilan orang tua dengan batas maksimal Rp4.000.000,00 per bulan atau Rp750.000,00 per anggota keluarga. Dokumen pendukung lain seperti rapor, ijazah, surat keterangan lulus, hingga foto kondisi rumah juga menjadi bagian penting dalam pembuktian.

Lebih lanjut, kriteria penerimaan di bawah naungan Kemenag dan Kemendikbud pada dasarnya serupa, yakni menekankan potensi akademik dan keterbatasan ekonomi. Namun terdapat sedikit perbedaan, yaitu pada syarat kepemilikan kartu. Kemenag memperbolehkan penggunaan KIP, KKS, SKTM, maupun surat penghasilan orang tua, sedangkan Kemendikbud mensyaratkan kepemilikan KIP dan KKS secara langsung. Dengan terpenuhinya prosedur, persyaratan, serta kriteria yang telah ditentukan, calon mahasiswa yang lolos tahap verifikasi dinyatakan sah sebagai penerima beasiswa KIP-K di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

### **Mekanisme Penerapan Kebijakan Program Beasiswa KIP-K**

Mahasiswa penerima KIP Kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memperoleh fasilitas berupa pembebasan UKT serta uang saku bulanan yang dicairkan melalui ATM kampus. Namun, pencairan dana tidak dilakukan secara otomatis, melainkan harus melalui tahapan verifikasi, salah satunya penginputan nilai IP dan IPK melalui formulir online. Mekanisme ini digunakan sebagai dasar penilaian kelayakan beasiswa pada semester berikutnya. Mahasiswa hanya berhak menerima KIP lanjutan apabila memiliki IP minimal 3,20, sehingga prestasi akademik menjadi faktor utama keberlanjutan program.

Apabila mahasiswa tidak memenuhi ketentuan tersebut, kampus memberikan peringatan hingga dua kali. Jika dalam dua periode tersebut tidak terdapat perbaikan nilai, maka beasiswa dapat diputus dan dialihkan kepada mahasiswa lain yang dianggap lebih berhak. Selain prestasi akademik, terdapat sejumlah kondisi yang juga dapat memengaruhi keberlanjutan beasiswa. Misalnya, status pernikahan yang meskipun tidak dilarang, dapat memengaruhi kelayakan penerima karena dianggap sudah memperoleh dukungan finansial tambahan dari pasangan. Begitu pula dengan larangan berpindah program studi atau perguruan tinggi, sebab tindakan tersebut secara otomatis menghilangkan hak mahasiswa untuk mengajukan KIP kembali.

Cuti akademik pada prinsipnya juga tidak diperkenankan, karena dana KIP-K hanya diperuntukkan untuk mendukung kegiatan pendidikan aktif. Kendati demikian, pengecualian dapat diberikan apabila cuti dilakukan atas dasar kondisi khusus seperti sakit. Dalam kasus tersebut, beasiswa tetap dapat berlanjut, meskipun masa bantuan tidak diperpanjang. Dengan demikian, keberlanjutan KIP-K tidak hanya ditentukan oleh aspek prosedural dan administratif, tetapi juga oleh kepatuhan mahasiswa terhadap aturan serta konsistensi dalam menjaga prestasi akademik.

### **Faktor faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan beasiswa KIP Kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**

Evaluasi terhadap ketercapaian tujuan Program KIP Kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menunjukkan bahwa program ini benar-benar memberi dampak signifikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Beasiswa ini tidak hanya meringankan beban biaya pendidikan dan biaya hidup, tetapi juga memotivasi mahasiswa untuk terus berprestasi. Hal tersebut terlihat dari berbagai testimoni mahasiswa penerima, yang menyatakan bahwa KIP-K menjadi jalan bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan tinggi tanpa terbebani masalah finansial. Dukungan finansial ini bahkan diakui sebagai kesempatan emas yang memotivasi mahasiswa untuk menjaga prestasi akademik dan meraih cita-cita, sekaligus menjadi kebanggaan bagi keluarga mereka.

Selain dari sisi penerima, mahasiswa non-penerima KIP-K juga memberikan persepsi positif. Mereka menilai bahwa mahasiswa penerima beasiswa cenderung lebih giat, aktif, dan memanfaatkan kesempatan berkuliah dengan sungguh-sungguh. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran program tidak hanya berdampak pada penerima secara langsung, tetapi juga menciptakan atmosfer akademik yang lebih sehat di lingkungan kampus. Meski demikian, muncul pula persepsi dari sebagian mahasiswa non-penerima yang

menilai bahwa penerima KIP kadang terlihat menggunakan fasilitas mewah, seperti ponsel atau kendaraan pribadi, sehingga menimbulkan anggapan kurang tepat sasaran. Namun, pihak pengelola KIP menegaskan bahwa kepemilikan barang tidak dapat dijadikan tolok ukur kondisi ekonomi, karena bisa jadi berasal dari hadiah atau pemberian.

Di balik manfaatnya, pelaksanaan KIP-K di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga menghadapi hambatan dan tantangan. Salah satu persoalan utama adalah lemahnya validasi data, terutama pada jalur mandiri yang rentan terhadap pemalsuan dokumen. Proses validasi yang ketat diperlukan untuk menjaga akuntabilitas, sehingga tim kemahasiswaan tidak hanya memeriksa dokumen, tetapi juga melakukan survei langsung ke rumah mahasiswa. Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala besar, khususnya untuk survei mahasiswa di luar Jawa yang akhirnya hanya bisa dilakukan secara daring. Tantangan lain yang muncul adalah akses ke daerah terpencil serta kurangnya keterbukaan keluarga dalam memberikan informasi terkait kondisi ekonomi. Kendati demikian, validasi lapangan tetap dipandang penting untuk menjaga transparansi dan kepercayaan publik terhadap program ini.

Selain validasi, kendala lain terletak pada lemahnya monitoring dan pengawasan berkala, terutama dalam hal penginputan nilai mahasiswa sebagai indikator kelayakan beasiswa. Keterlambatan pengisian nilai oleh dosen, mahasiswa yang masih menempuh remedial, hingga kendala teknis sistem informasi akademik seringkali menghambat kelancaran pencairan dana. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan sistem administrasi, peningkatan koordinasi, serta penambahan tenaga khusus untuk pengelolaan data. Di samping itu, terdapat kasus pelanggaran ketentuan oleh mahasiswa, seperti menikah atau pindah program studi tanpa melapor kepada pihak kampus. Pelanggaran ini sulit terdeteksi akibat keterbatasan pengawasan, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai aturan KIP-K agar mahasiswa memahami konsekuensi dari setiap pelanggaran, baik bagi diri mereka sendiri maupun mahasiswa lain yang berpotensi kehilangan kesempatan.

Dengan berbagai manfaat sekaligus tantangan yang ada, dapat disimpulkan bahwa Program KIP Kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memberikan kontribusi besar dalam mendukung akses pendidikan tinggi yang lebih merata. Namun, keberhasilan program ini tetap sangat bergantung pada pengelolaan yang transparan, validasi data yang ketat, serta pengawasan yang berkelanjutan agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

### **HAMBATAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN PROGRAM BEASISWA KIP-K**

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan program KIP-K di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah lemahnya validasi data, terutama pada proses rekrutmen mahasiswa jalur mandiri. Jumlah pendaftar pada jalur ini relatif lebih banyak dibandingkan jalur lain sehingga memerlukan seleksi ketat agar adil dan transparan. Pembukaan kembali jalur mandiri sempat menimbulkan kontroversi karena dianggap rawan pemalsuan data, dan pada praktiknya memang ditemukan beberapa kasus meskipun jumlahnya terbatas. Kondisi ini menegaskan pentingnya pengawasan dan verifikasi yang lebih ketat agar bantuan benar-benar diberikan kepada mahasiswa yang layak.

Validasi data menjadi tahap krusial dalam memastikan akuntabilitas program. Proses ini melibatkan verifikasi dokumen pendukung, seperti surat keterangan tidak mampu, data pendapatan orang tua, serta catatan akademik calon penerima. Selain itu, setelah mahasiswa resmi menerima beasiswa, tim kemahasiswaan juga melakukan survei lapangan ke rumah mahasiswa untuk mencocokkan kondisi ekonomi dengan data yang diajukan. Namun, keterbatasan dana menjadi kendala, terutama untuk mahasiswa di luar Jawa, sehingga verifikasi hanya bisa dilakukan secara daring melalui video call. Tantangan lain yang dihadapi adalah akses ke daerah terpencil serta sikap keluarga yang kadang enggan memberikan informasi secara terbuka. Meskipun demikian, validasi tetap dianggap penting untuk menjaga integritas program dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap beasiswa KIP-K.

Selain masalah validasi, hambatan lain yang muncul adalah lemahnya monitoring dan pengawasan secara berkala. Salah satu kendala terbesar terdapat pada keterlambatan penginputan nilai mahasiswa yang menjadi indikator kelayakan penerima beasiswa. Keterlambatan ini dapat disebabkan oleh dosen yang terlambat mengisi nilai, mahasiswa yang masih menjalani remedial, maupun kendala teknis dalam sistem informasi akademik. Situasi ini seringkali menghambat pencairan dana karena tim pengelola harus menunggu hingga semua nilai benar-benar terinput. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem akademik serta peningkatan koordinasi antara dosen, administrasi akademik, dan pengelola beasiswa.

Di sisi lain, terdapat pula permasalahan pelanggaran ketentuan oleh mahasiswa penerima KIP-K. Beberapa kasus yang ditemukan antara lain mahasiswa menikah, pindah program studi, atau bahkan pindah perguruan tinggi tanpa melapor kepada pihak kampus. Padahal, aturan program secara tegas melarang tindakan tersebut karena dapat mengganggu fokus akademik dan mengurangi kesempatan mahasiswa lain untuk memperoleh bantuan. Lemahnya pengawasan serta kurangnya keterbukaan mahasiswa menjadi penyebab sulitnya mendeteksi pelanggaran ini. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai aturan dan konsekuensi program KIP-K perlu lebih ditingkatkan, agar mahasiswa memahami bahwa pelanggaran tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga berimplikasi pada keberlanjutan program bagi penerima lain.

### **Solusi Untuk Kebijakan KIP-K Di UIN Maulana Maik Ibrahim Malang**

Penguatan komitmen dan transparansi dalam pelaksanaan beasiswa KIP-K di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga integritas program. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan cross check dokumen guna memverifikasi keaslian dan kesesuaian berkas yang diserahkan calon penerima dengan kondisi sebenarnya. Proses ini dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan sekaligus memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada mahasiswa yang membutuhkan. Pada tahap awal, pihak kampus mengumpulkan seluruh dokumen persyaratan secara offline, kemudian melakukan pengecekan silang dengan data yang dikirimkan secara online. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi potensi kecurangan sekaligus memperkuat validitas proses seleksi.

Selain itu, adanya tanda tangan kontrak antara mahasiswa penerima KIP dan staf bagian KIP juga menjadi strategi untuk memperkuat komitmen serta disiplin mahasiswa. Kontrak ini berfungsi sebagai dasar hukum yang mengikat kedua belah pihak, sehingga hak dan kewajiban dapat terlindungi secara jelas. Dengan adanya kontrak, mahasiswa diharapkan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga prestasi akademik maupun mengikuti kewajiban lain yang telah ditentukan. Tidak hanya itu, kontrak juga mempermudah pihak kampus dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerima beasiswa, sehingga keberlangsungan program dapat berjalan sesuai ketentuan. Oleh karena itu, penyusunan draft kontrak yang memuat seluruh persyaratan dan kewajiban mahasiswa menjadi langkah awal yang penting, disertai dengan sosialisasi sebelum mahasiswa menandatangani.

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan sistem monitoring dan pengawasan. Koordinasi antar bagian, mulai dari dosen, staf administrasi akademik, hingga tim IT, perlu diperkuat melalui pembentukan tim koordinasi khusus. Tim ini berperan dalam memantau jalannya proses penginputan nilai agar sesuai dengan prosedur dan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Rapat koordinasi rutin dapat dijadikan forum evaluasi, berbagi kendala, sekaligus merumuskan solusi aplikatif sehingga setiap pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai kebijakan maupun proses yang sedang berlangsung. Selain itu, sistem monitoring terhadap dosen yang bertugas menginput nilai juga perlu diperketat. Pemantauan berkala, evaluasi objektif, serta mekanisme pelaporan yang transparan akan membantu mendeteksi permasalahan sejak dini. Untuk mendukung kepatuhan, pihak kampus dapat memberikan pelatihan atau pendampingan bagi dosen yang mengalami kesulitan, serta memberikan penghargaan atau bonus bagi mereka yang konsisten tepat waktu. Dengan cara ini, motivasi dosen untuk bekerja lebih disiplin akan meningkat, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif.

Di sisi lain, peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada mahasiswa juga tidak boleh diabaikan. Pemahaman yang mendalam tentang ketentuan program KIP-K sangat diperlukan agar mahasiswa mampu mematuhi aturan dengan penuh kesadaran. Workshop atau seminar rutin yang ditujukan bagi mahasiswa baru maupun penerima KIP-K dapat menjadi wadah untuk menyampaikan informasi secara komprehensif, termasuk aturan penting seperti larangan menikah selama masa studi dan konsekuensi yang harus ditanggung jika melanggar. Selain kegiatan tatap muka, kampanye kesadaran juga dapat dilakukan melalui media sosial maupun website resmi kampus sebagai pengingat berkelanjutan bagi mahasiswa. Dengan adanya strategi sosialisasi yang konsisten, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami aturan program, tetapi juga menyadari bahwa kepatuhan terhadap ketentuan beasiswa merupakan bentuk tanggung jawab yang membawa manfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk keberlanjutan kesempatan mahasiswa lain yang membutuhkan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **SIMPULAN**

Implementasi beasiswa KIP kuliah di UIN Maulana malik Ibrahim Malang sudah dapat dikatakan efektif karena telah mencapai tujuan awal program KIP berdasarkan hasil kuisioner peneliti, banyak

mahasiswa penerima KIP yang menyatakan bahwa KIP kuliah ini sangat bermanfaat untuk kebutuhan hidup, Pendidikan, dan uang makan. Dan pendapat mahasiswa non-penerima KIP kuliah mengatakan bahwa mahasiswa penerima KIP kuliah lebih bersemangat dan bersungguh sungguh dalam belajar dan mengejar prestasi dibandingkan mahasiswa non-penerima KIP kuliah. Selain itu beasiswa KIP-Kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sudah tepat sasaran karena tim standarisasi nya melakukan survey langsung ke rumah beberapa mahasiswa.

Namun meskipun begitu terdapat hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan program KIP-K di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diantaranya proses Validasi data yang ketat, telatnya proses penginputan nilai mahasiswa, dan adanya mahasiswa yang melanggar aturan KIP-K seperti pemalsuan dokumen dan ada mahasiswa yang menikah secara sembunyi sembunyi. Oleh karena itu proses penyeleksian mahasiswa penerima KIP k harus dilaksanakan secara ketat dan efektif supaya tidak terjadi mahasiswa penerima KIP-K salah sasaran.

## SARAN

Bagi penelitian berikutnya, para peneliti bisa memperdalam analisis terhadap kebijakan, program-program, dan faktor-faktor implementasi dari era orde lama hingga sekarang. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan dapat menjadi lebih efektif dan menghasilkan kontribusi yang berbeda dibandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan atau saran untuk pemerintah, mahasiswa, perguruan tinggi, dan masyarakat umum bahwa program beasiswa KIP sangat penting untuk mendukung pencapaian prestasi mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

## DAFTAR RUJUKAN

- Amin1, A., Sasongko2, R. N., & Armi Yuneti. (2022). *Kebijakan KIP untuk membantu Mahasiswa Kurang Mampu*. 5, 98–107. <https://doi.org/10.31539/alignment.v5i1.3803>
- Dimmera, B. G., & Purnasari, P. D. P. (2020). Permasalahan Dan Solusi Program Indonesia Pintar Dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Di Kabupaten Bengkayang. *Sebatik*, 24(2), 307–314. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v24i2.1137>
- Kemdikbud. (2024). Pedoman Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka 2024. *Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia*, 23.
- Larasati, A. D., Dinda, D., Aidah, N. A., Gustiputri, R., Neisyah, S., & Isyak, R. (2022). *ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR-KULIAH ( KIP-K ) DI UNIVERSITAS*. 5(September).
- Maimun, A. (2020). *Penelitian Studi Kasus Bidang Pendidikan Islam*. UIN Maliki Press.
- Publik, A. K. (2013). *Teori Kebijakan Publik Dye*.
- Rektor, S. K. (2022). Petunjuk Teknis Seleksi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Bagi Mahasiswa Angkatan Tahun 2022. In *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.

Sufa, M. F. (2012). *Identifikasi Kriteria Keberhasilan Proyek*. 11(1), 19–22.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA*. (2003).

Yusra, F., Sitorus, A., & Hs, N. (2024). Analisis Kebijakan Kip-Kuliah: Tinjauan Kualitatif Terhadap Pengalaman Mahasiswa Universitas Malikussaleh Angkatan 2022. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 1(11), 944–951.